



Kini Hadir 193 Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil memenuhi deretan indikator yang ditetapkan untuk merah predikat Kota Layak Anak (KLA).

Predikat tersebut punya arti penting, bagi proses pembangunan yang lebih inklusif, serta melibatkan semua pihak.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya mengatakan, pembangunan yang inklusif ini, tentu tidak bisa dipisahkan dengan pemenuhan hak dan perlindungan pada anak.

Sebab, anak merupakan bagian dari masa depan, sehingga harus memperoleh perhatian lebih.

"Jadi, KLA ini, tidak hanya dikejar untuk sebuah predikat saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi pembangunan perkotaan yang ideal secara inklusif," urainya.

Aman mengatakan, guna mencapai itu, pihaknya mengawali dengan sebuah membangun kemitraan, melibatkan unsur dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat, hingga media. Kemitraan jadi langkah efektif, agar

hak dan perlindungan anak, terpenuhi secara optimal.

"Tentunya, untuk mewujudkan KLA, Pemkot mendukung penuh lewat politik anggaran. Sudah dialokasikan dari APBD, untuk menjalankan sejumlah program dan kebijakan dalam pemenuhan hak anak di Kota Yogya," ujarnya.

Sejumlah program yang dimaksud antara lain, membentuk Satgas Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan, maupun pendidikan fasilitas umum ramah anak. Yaitu, 456 sekolah ramah anak, 193 kampung ramah anak, 18 Puskesmas ramah anak, serta 2 rumah sakit ramah anak.

Bahkan, Pemkot Yogya secara khusus menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak. Musrenbang Anak tersebut, sejak awal diikuti oleh perwakilan anak dari tiap wilayah, guna memberikan usulan untuk dimasukkan dalam program pembangunan.

"Atmosfer layak anak bukan hanya dari aspek pemerintah saja, melainkan benar-benar terwujud dan terus tersemadi di



PENJELASAN - Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya memberikan penjelasan dalam sebuah acara di kanal YK TV milik Pemkot Yogyakarta.

masyarakat. Maka, dari tingkat bawah, hingga level atas mencerminkan ramah anak," katanya.

Ramah anak Sementara itu, progres kampung ramah anak di wilayah Kota Yogyakarta terus menunjukkan sinyal positif. Kesadaran warga

masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak semakin meningkat dewasa ini. Publik pun menyadari, bahwa anak merupakan elemen yang harus didengar aspirasinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, mengatakan, hingga saat ini, telah terealisasi 193 kampung ramah anak di wilayahnya. Pihaknya meyakini, jumlah itu bakal terus meningkat.

Dijelaskannya, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Yogyakarta sudah melakukan kajian, untuk mengukur keaktifan kampung ramah anak tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan itu, kampung ramah anak pun dibagi dalam beberapa kategori, tergantung tingkat keaktifannya.

"Mulai dari pratama, madya, nindya, utama dan yang paling tinggi itu kampung ramah anak. Ternyata, beberapa benar-benar sudah memenuhi unsur kampung ramah anak itu. Maka, layak diapresiasi," jelasny. Minggu (26/6).

Dalam artian, lingkungan penduduk yang telah memenuhi standar kampung ramah anak tersebut, sudah menjalankan kelima asas secara menyeluruh. Yaitu, kehidupan lebih baik untuk

anak, menjamin proses tumbuh kembangnya anak, partisipasi anak di lingkungannya, tak ada diskriminasi terhadap anak, sampai perlindungan kepada anak.

"Jadi, tidak sebatas memberikan perlindungan saja. Tapi, suara dari anak ini juga harus didengar, diberi ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya. Kalau memang itu positif, ya, dapat ditindaklanjuti," ungkap Edy.

Ia mengatakan, untuk mendeklarasikan sebuah kampung ramah anak, warga masyarakatnya harus memahami dahulu seputar konvensi hak anak. Setelah pemahaman itu didapat, maka komitmen untuk menjamin hak, serta menciptakan lingkungan lebih baik bagi anak pun praktis muncul.

"Kemudian, bentuk kepengurusan dan program kegiatan. Karena ini gerakan di wilayah, maka dukungannya pun tentu dengan swadaya. Tapi, karena Pemkot mempunyai Gandeng-Gendong, itu bisa diintegrasikan di sana," terangnya. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005